

UNITRI Press

Aldo U. K. Pamara



Lecture -- no repository 048



Lecture



Gambella University

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3256918601

Submission Date

May 22, 2025, 4:56 AM GMT+2

Download Date

May 22, 2025, 5:00 AM GMT+2

File Name

Aldo_U_K_Pamara_2021210039.docx

File Size

4.5 MB

10 Pages




1,440 Words

10,299 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 13%  Internet sources
- 4%  Publications
- 5%  Submitted works (Student Papers)



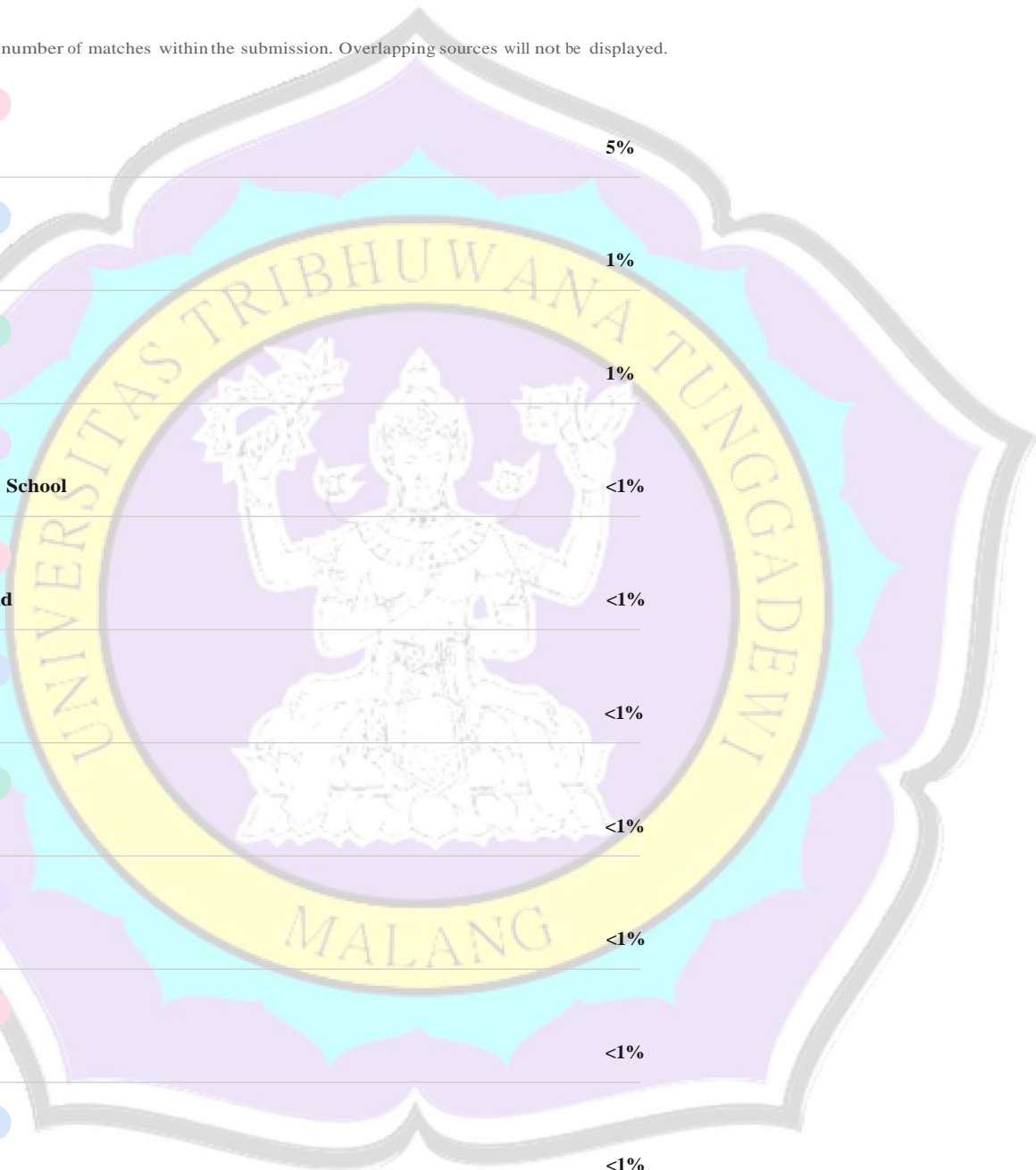
Top Sources

- 13% Internet sources
- 4% Publications
- 5% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	rinjani.unitri.ac.id	5%
2	Internet	docplayer.info	1%
3	Internet	www.scilit.net	1%
4	Student papers	St. Ursula Academy High School	<1%
5	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
6	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
7	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
8	Internet	id.123dok.com	<1%
9	Internet	inba.info	<1%
10	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
11	Internet	smkn1majalengka.sch.id	<1%



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI**



ALDO U. K. PAMARA
NIM. 2021210039

2025

bertujuan menyelidiki kebijakan pengelolaan limbah pemerintah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

organisasi birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Teknik pengambilan sampel secara sengaja dan tidak sengaja digunakan untuk memilih masyarakat sebagai informan utama sedangkan dokumentasi,

pelaksanaan teknik pengelolaan limbah bergantung pada proses birokrasi yang efektif, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan dipahami

melibatkan penyampaian informasi yang lugas, penyampaian pesan yang konsisten, dan konsistensi. Arsitektur birokrasi yang fleksibel dan transparan memudahkan pelaksanaan kebijakan melalui kolaborasi antar lembaga yang efisien. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak negatif lingkungan, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemilahan dan pengelolaan sampah juga membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Evaluasi analisis kebijakan retrospektif menekankan perlunya tim analisis yang luas dalam mengidentifikasi masalah dan menerapkan perubahan kebijakan yang diperlukan. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif sangat didukung oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat, undang-undang pemerintah, dan keterlibatan organisasi masyarakat. Namun, sejumlah kendala masih ada, seperti terbatasnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, dan pelatihan yang tidak memadai. Meskipun ada upaya untuk meningkatkannya melalui penggunaan teknologi baru dan program pengajaran, efektivitas pengelolaan limbah masih bergantung pada kerja sama berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Sampah



2

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] keempat [REDACTED]

[REDACTED] Selain luas wilayahnya [REDACTED] sangat besar, posisi fisiknya sebagai negara kepulauan yang besar, dan persebaran penduduknya yang tidak merata merupakan hambatan yang memperparah berbagai masalah demografi. Pengaruh faktor regional, tingkat migrasi yang tinggi, dan keragaman penduduk secara signifikan memperparah berbagai tantangan tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umum penduduk Indonesia, masalah kependudukan ini memerlukan perhatian khusus.

Salah satu jenis sampah yang dibuang dan terus bertambah oleh masyarakat adalah sampah padat. Sampah padat adalah sampah yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak bernilai dan berasal dari aktivitas manusia atau hewan (Theisen, 2008). Pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan, dilakukan secara tertib untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Berbagai tahapan dicakup oleh kebijakan pengelolaan sampah, seperti pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Khususnya di Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang, di mana volume sampah meningkat [REDACTED]

3

konsumen, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang cukup besar dalam

mengelola sampah. Kemampuan pengelolaan sampah TPST3R Mulyoagung Bersatu dapat menangani ratusan meter kubik sampah setiap hari dan mengurangi sampah yang masuk hingga lebih dari setengahnya, yang membantu ribuan orang. Langkah awal dalam sistem pengelolaan adalah pengumpulan sampah dari rumah ke rumah. Selanjutnya, sampah dikirim ke fasilitas pengumpulan untuk dipilah berdasarkan jenisnya. Di wilayah Jawa Timur, sampah anorganik dipecah menjadi ratusan komponen yang dapat didaur ulang dan dipasok ke mitra pabrik daur ulang, sedangkan sampah organik ditangani dengan menggunakan dua cara utama. Ketika sampah daun pertama kali dikomposkan menggunakan metode baris angin, sejumlah besar pupuk organik dengan nilai pasar tertentu diproduksi setiap bulan. Kedua, sampah makanan dikumpulkan dalam jumlah besar dan diberikan kepada hewan sebelum diproses lebih lanjut untuk menghasilkan belatung sebagai sumber daya alternatif.

11 Sejak Inovasi Edukasi Cipta Kerja Sampah dinobatkan sebagai [REDACTED] [REDACTED] Indonesia Tahun 2021 (jipnas menpan.go.id 2024), Pemerintah Kabupaten Malang sangat terdorong untuk terus meningkatkan kinerja TPST3R Mulyoagung Bersatu melalui pembinaan yang terpadu dan sinergis antara berbagai pemangku kepentingan serta memperluas pelaksanaannya di seluruh Kabupaten Malang. Gagasan perilaku sosial menyatakan bahwa permasalahan sampah secara langsung dipengaruhi oleh sikap dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan. Menurut konsep perilaku prososial, masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan menunjukkan perilaku positif, seperti memilah sampah, membuang sampah pada

tempatnnya, dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Masyarakat dipandang sebagai pemangku kepentingan utama dalam keberhasilan inisiatif pengelolaan sampah, yang sejalan dengan gagasan keterlibatan kebijakan lingkungan (Sitorus & Sitio, 2024).

Secara hukum, konsep bahwa masyarakat dan pemerintah berbagi tanggung jawab mengatur pengelolaan sampah. Untuk menjaga keberlanjutan dan kebersihan lingkungan pada tingkat individu dan masyarakat, pengelolaan ini memerlukan sejumlah tahapan yang harus diselesaikan secara terkoordinasi dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir sampah. Tanpa keterlibatan masyarakat yang berarti, proyek pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan secara efektif atau secara signifikan

koordinasi yang efisien antara banyak pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung merupakan upaya nyata untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang semakin rumit akibat kebiasaan

di wilayah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup transformasi masyarakat, aturan dan regulasi yang jelas, serta keterlibatan aktif masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, sejumlah tantangan muncul, yang terutama adalah kelangkaan sumber daya, termasuk personel yang sedikit, armada kendaraan yang tidak memadai, dan kurangnya infrastruktur pendukung berupa fasilitas

pembuangan sampah sementara. Selain itu, kurangnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat terus menimbulkan tantangan serius karena masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah, terutama yang berkaitan dengan pemilahan dan daur ulang. Peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah harus diberlakukan dengan lebih banyak kolaborasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Mulyoagung.

Buruknya implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kerja sama antara pihak-pihak terkait. Topografi yang sulit dan akses yang terbatas membuat pengangkutan dan pemasangan sistem pembuangan sampah menjadi sulit. Selain itu, kapasitas pengelolaan saat ini belum memadai, yang diperparah oleh semakin banyaknya sampah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih substansial untuk mengurangi sampah, menerapkan teknologi yang sesuai, dan mengembangkan sistem daur ulang yang efektif dan tahan lama. Penelitian ini dipilih untuk dilakukan di tempat yang dianggap strategis dan representatif karena sampah merupakan masalah utama yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan karena penting untuk memahami bagaimana metode pengelolaan sampah benar-benar diterapkan. Tempat ini dipilih karena aksesibilitasnya dan potensi dukungan untuk penelitian, dibandingkan dengan daerah lain dengan fitur serupa tetapi kurang mendukung untuk metode penelitian yang efektif.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif, khususnya di Desa Mulyoagung. Metode ini bertujuan untuk menawarkan pengelolaan akhir yang ramah lingkungan, mengurangi volume sampah, dan meningkatkan pemilahan dan daur ulang. Pengelolaan ini menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah dan masyarakat untuk berbagi tugas dalam rangka menjaga lingkungan yang bersih. Tujuan pengelolaan sampah yang efisien adalah untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang akan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan mendorong pola perilaku masyarakat untuk lebih sadar dan proaktif dalam memilah dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomis, teknik ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

7 Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan kajian mendalam tentang sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik di tingkat desa, sekaligus [REDACTED] atau kendala-kendala yang dihadapi. Meskipun tujuan dari metode ini adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari, namun dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala, seperti minimnya dana, minimnya kesadaran masyarakat, serta kondisi geografis dan infrastruktur yang kurang mendukung. Oleh karena itu, untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan, serta untuk lebih mendalami efektivitas kebijakan, maka peneliti memilih untuk memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah [REDACTED] Mulyoagung.

1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Seberapa baik [REDACTED] Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah pemerintah?

2 Aspek apa saja dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah Desa Mulyoagung yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya?

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] implementasi kebijakan [REDACTED] pengelolaan sampah

[REDACTED] Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten

[REDACTED] pemerintah

pengelolaan sampah.

Penelitian

penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademik; Selain berfungsi sebagai referensi bagi penelitian masa depan yang membahas kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan, penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan literatur tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

[REDACTED]

10 [redacted] desa, Selain berfungsi sebagai panduan untuk membuat kebijakan serupa di lokasi lain, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan kebijakan pengelolaan sampah Desa Mulyoagung.

b. Bagi masyarakat, Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan dalam inisiatif pengelolaan sampah ramah lingkungan.

